

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan suatu fenomena aktual di Indonesia sejak awal era reformasi. Adapun jika merujuk pada UU No. 16 Tahun 2017 sebagai perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, secara definitif ormas dapat diartikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ormas merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa Indonesia. Sebagai lembaga non-pemerintah, ormas sangat penting dalam kehidupan negara demokrasi. Ormas tidak hanya perkumpulan masyarakat; lebih lanjut secara filosofis, ormas mewadahi nilai kebebasan berpendapat dan nilai sosial serikat masyarakat. Idealnya, ormas diharapkan mampu menjadi perekat pembangunan sosial bangsa Indonesia. Pembangunan sosial dapat dicapai melalui proses pembentukan kesadaran penduduk dalam tataran landasan dan tujuan yang sama. Kesamaan visi inilah yang kemudian dicita-citakan dalam pelaksanaan tujuan kegiatan. Hal tersebut memuat kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran melalui wadah kelompok ormas.

Ormas merupakan simpul pemersatu elemen bangsa, khususnya di Jakarta sebagai daerah yang sering dijuluki miniatur Indonesia. Kehadiran ormas di Jakarta tentu menjadi penting. Tingkat keragaman sosial yang

tinggi di Jakarta membuat ormas di Jakarta juga turut beragam. Ormas di Jakarta terdiri dari berbagai basis mulai dari keagamaan, kepemudaan, profesi, dan sebagainya. Berdasarkan situs resmi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2017 tercatat ada 107 nama kelompok ormas yang resmi terdaftar melalui Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

Sayangnya keberadaan beberapa ormas seringkali bergesekan, dan gesekan tersebut berada di tingkat akar rumput (*grass root*) dengan adanya seteru pribadi serta kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. KH. Lutfi Hakim, M.A. selaku Ketua Umum salah satu ormas besar di Jakarta, Forum Betawi Rempug (FBR) mengemukakan hal tersebut ketika diwawancarai portal berita Vivanews, di kediamannya di kawasan Ujung Menteng, Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa persoalan konflik seperti ini ada di setiap lapisan dan faktanya memang terus berulang. Di level atas, semua berkaitan dengan kepentingan elit, sedangkan di level bawah semua berkaitan dengan isi perut dan kelangsungan hidup seseorang. Konflik pasti muncul di lapisan bawah. Ia menambahkan, pemerintah harus memaksimalkan upaya mensejahterakan masyarakat sehingga kebutuhan dasar dapat terpenuhi, dan masyarakat dapat hidup tenang dan damai.

Pada tahun 2014, bentrokan terjadi antara ormas FBR dengan Pemuda Pancasila (PP) di Mampang, Jakarta Selatan. Dikutip dari detikNews, kejadian ini terjadi pada Minggu, 10 Agustus 2014 dimulai dengan aksi lempar batu dan berujung pada perusakan rumah anggota PP Jakarta Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menjabat saat itu, Kombes Pol. Rikwanto mengatakan perusakan terlebih dulu dilakukan oleh 40 anggota ormas FBR dan kemudian massa PP melakukan strategi bertahan dengan membawa senjata tajam dan berkonvoi menggunakan sepeda motor.

Pada akhir Januari 2017 dilansir dari Tribun News, 30 pemuda beratribut PP menyerang markas FBR di Jalan KH Syafi'i Hadzami RT 02/05 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,

Senin (30/1/2017) sekitar pukul 17.15 WIB. Para pemuda tersebut menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam. Akibat penyerangan ini, dua orang terluka serta dua buah mobil yang kala itu sedang terparkir di dekat Pos FBR pun rusak. Merujuk pada CNN (22 Juni 2016), FBR yang berdiri lebih dari 15 tahun yang lalu kini memiliki anggota 600 ribu orang di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lutfi Hakim tidak membantah jika ormas yang dipimpinnya kerap terlibat bentrokan dengan kelompok yang lain. Ia menilai, hal tersebut tak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat Jakarta yang beragam. Tawuran dengan ormas lain yang melibatkan FBR kerap terjadi karena adanya rasa kesetiakawanan yang tinggi. Ormas FBR turut terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan memfasilitasi para anggotanya sebagai pekerja jasa keamanan. Kelompok ini juga mengelola parkir di tanah kosong. Namun, FBR tidak akan mengambil jatah pengamanan dan bisnis di diskotek atau klub malam.

Front Pembela Islam (FPI) adalah nama ormas lain yang juga beberapa kali mengalami konflik. Terakhir kasus yang mengemuka yakni pada aksi unjuk 4 November 2016 (411), FPI terlibat aksi keributan dan saling serang lempar botol air mineral dan batu bata dengan demonstran HMI di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Kemudian baru-baru ini, pada April 2017 massa FPI Jakarta bergesekan dengan massa Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) di kawasan Kramat Lontar. Disadur dari rubrik Nasional harian Republika pada 18 April 2017, bentrokan tersebut terjadi lantaran kesalahpahaman kedua kubu. Ketua Tanfidz DPD FPI DKI Jakarta, Buya Majid menjelaskan bahwa FPI mengutuk gerombolan preman yang melakukan penyerangan terhadap warga Kramat Lontar. Preman tersebut mengatasnamakan Banser dan disebut Buya menyerang warga secara brutal.

Ormas yang idealnya membantu pemerintah dan mengemban peran penting dalam membangun bangsa, justru memang acapkali terpecah dalam konflik dan meresahkan warga. Anggota Komisi I DPR, Jazuli Juwaini menyampaikan hal tersebut ketika ditemui Media Harapan.

la mengatakan, ormas memiliki peran vital memberikan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah, jika dibandingkan oleh parlemen dan partai politik. Menurutnya, tidak mungkin parlemen dan parpol mengambil peran-peran sepenuhnya untuk mengevaluasi pemerintah. Maka, ormas juga punya peran atas hal tersebut. Ia juga menghimbau agar aparat hukum harus berada di tengah dan menjadi wasit dalam konflik antar ormas.

Diperlukan kapasitas lembaga serta implementasi tugas pokok dan fungsi yang tepat dan terencana, untuk menanggulangi permasalahan konflik kelompok, khususnya konflik antar ormas di Jakarta. Kapasitas lembaga didefinisikan sebagai kemampuan lembaga untuk melaksanakan fungsi utamanya secara efisien dan efektif (World Bank, 2011). Kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik di Indonesia dapat merujuk pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Dalam pasal tersebut, pencegahan sosial didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Pencegahan konflik menjadi aspek yang paling krusial karena dapat mengurangi kemungkinan pecahnya sebuah konflik yang akan berujung pada korban jiwa dan kerugian material.

Menurut Lan, dkk (2014: 8), ada tiga hal yang harus dibangun dalam upaya pencegahan konflik, yaitu: 1) Pengembangan mekanisme institusional untuk mencegah intensitas dan eskalasi konflik; 2) Pembangunan mekanisme peringatan dini agar tiap lembaga dapat memantau hubungan-hubungan yang ada di tingkat masyarakat dan negara, dan 3) Peningkatan kapasitas masyarakat yang rawan konflik. Terdapat lima langkah prioritas yang harus dilakukan dalam tindakan pencegahan konflik, yaitu kelembagaan pencegahan konflik, pengenalan potensi konflik, manajemen pengetahuan tentang pencegahan konflik, perancangan strategi pencegahan konflik berdasarkan isu, dan tindakan pencegahan konflik itu sendiri.

Adanya fasilitasi integrasi dan manajemen konflik antar ormas melalui suatu lembaga/badan koordinator pemerintahan merupakan upaya yang tepat. Terdapat suatu badan pemerintahan yang menjalankan upaya tersebut, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sesuai dengan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015, Bakesbangpol merupakan sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Adapun tiga tataran yang diusung yakni efektivitas, keterpaduan, dan sinergi. Terkait dengan keberadaan dan dinamika konflik antar ormas, dalam perspektif peneliti, Bakesbangpol menjadi instansi utama yang bersinggungan besar dengan hal ini. Bakesbangpol menjalankan tugas dan fungsinya dengan dibentuknya struktur komando kewaspadaan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, penanganan konflik, dan pemantauan ormas.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah Bakesbangpol sebagai lembaga yang berkapasitas dalam fasilitasi dan resolusi. Adapun lokasi subjek penelitian yang dipilih yakni pada tingkat Provinsi DKI Jakarta, provinsi sentral pemerintahan dengan segala kompleksitasnya. Sebagai daerah berstatus khusus yang juga menjadi tempat kedudukan Ibukota negara, Jakarta memiliki ciri tersendiri dibanding provinsi lain dalam hal beban tugas, tanggung jawab dan tantangan yang kompleks. Kenyataan ini bersumber dari faktor luas wilayah yang terbatas, jumlah populasi yang tinggi, dan komposisi masyarakat yang majemuk/multi etnis dengan muatan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Utamanya menyangkut dinamika kelompok ormas, yang bahkan acapkali pecah dalam berbagai bentuk konflik. Oleh karena itu, Bakesbangpol DKI Jakarta sebagai unsur pendukung tugas pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, berperan penting dalam upaya menciptakan situasi kondisi politik yang kondusif yang mendukung penguatan persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong proses peningkatan pemahaman demokrasi dan HAM yang berdasarkan nilai-nilai luhur ideologi bangsa Pancasila dan UUD 1945.

Adapun tugas dan fungsi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta selama ini diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Khususnya terkait bahasan penelitian ini, yakni pengelolaan ormas (mencakup perencanaan, pencegahan konflik, pembinaan, dan koordinasi) telah dilakukan dalam beberapa kegiatan seperti:

1. Giat penyusunan teknis perencanaan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta;
2. Forum sosialisasi program pendaftaran SKT *online*;
3. Forum silaturahmi pimpinan daerah dengan pengurus ormas Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta;
4. Sarasehan pengembangan wawasan kebangsaan untuk ormas;
5. Rapat koordinasi dengan Kantor Pertahanan Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan Ditjen Strahan Kemhan RI, pejabat SKPD terkait, Forkopimda, Kodim, Polres, akademisi, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, jurnalis;
6. Pendataan ulang dan verifikasi ormas;
7. Pemberdayaan ormas;
8. Peningkatan kemitraan dengan ormas;
9. Rapat bulanan; dan
10. Rapat Forkopimda.

Kegiatan tersebut mengandalkan jumlah pegawai di Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta sebanyak 62 orang dengan komposisi 14 orang berpendidikan S-2, 22 orang S-1, 6 orang berpendidikan D-III, dan 20 orang berpendidikan non sarjana. Tugas dan fungsi dijalankan dengan kapasitas lembaga mengacu pada visi dan misi Pemprov DKI Jakarta, mengingat juga bahwa Bakesbangpol Provinsi berada langsung di bawah naungan Pemprov. Adapun implementasi yang telah berjalan selama ini perlu dioptimalkan lagi utamanya pada tahap preventif dan rekonsiliasi, mengingat masih tingginya konflik kepentingan dan kurangnya rasa toleransi dalam masyarakat, sehingga isu gesekan kelompok khususnya

ormas mudah mengemuka sebagai konflik, lalu berujung pada persoalan ketentraman dan ketertiban di Jakarta. Tahap rekonsiliasi juga penting, hal ini bermasalah sebab masih terdapat endapan stigma dan stereotipe antar ormas, sehingga konflik terus saja terulang.

Stabilitas politik pascakonflik merupakan agenda penting bagi upaya Bakesbangpol DKI Jakarta dalam mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum. Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan *excess* dan *dispute* yang potensial terjadi. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang demokratis di tingkat lokal serta peningkatan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap dipelihara. Sebab, terwujudnya lingkungan yang bebas dari berbagai gangguan dan konflik sosial adalah modal dasar bagi pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta mengalami sejumlah tantangan dalam implementasi tugas pokok dan fungsi mengelola ormas dan menangani konflik antar ormas di Jakarta. Dengan kapasitas lembaga yang terbatas dan beban kerja yang khusus yakni di wilayah Jakarta sebagai daerah otonom sentral pemerintahan Indonesia. Program implementasi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta nyatanya belum cukup optimal mengatasi konflik antar ormas di Jakarta. Padahal konflik antar ormas telah menjadi fenomena tersendiri, yang jika tidak ditanggulangi dan difasilitasi melalui suatu *leading sector* akan menjadi ancaman disintegrasi masyarakat Jakarta. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis mengajukan dua pertanyaan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam manajemen konflik antar ormas yang terjadi di Jakarta (2014-2017)?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, pada manajemen konflik antar ormas di Jakarta (2014-2017)?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam manajemen konflik antar ormas yang terjadi di Jakarta (2014-2017).
2. Menganalisis sejumlah faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam manajemen konflik antar ormas di Jakarta (2014-2017).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan keilmuan studi Damai dan Resolusi Konflik yang bersifat multidisiplin. Penelitian ini berisi analisis mengenai implementasi tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol DKI Jakarta dalam manajemen konflik antar ormas tahun 2014-2017 di Jakarta, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lain yang berkaitan dengan urgensi badan pemerintah dalam kerangka manajemen konflik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah analisis implementasi tugas pokok dan fungsi lembaga, serta manajemen konflik antar ormas di Jakarta yang dapat digunakan oleh Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta agar lembaga ini semakin optimal. Skema manajemen konflik yang menjadi produk dari penelitian ini dapat digunakan Bakesbangpol, tidak hanya di Provinsi DKI Jakarta tetapi juga dapat menjadi referensi di provinsi lainnya. Yang terpenting juga adalah skema manajemen konflik ini sesuai dengan kajian ilmu pertahanan negara, khususnya pertahanan nirmiliter. Dalam perspektif peneliti, Bakesbangpol sebagai unsur pemerintah turut andil dalam keamanan dan pertahanan, khususnya bidang damai dan resolusi konflik.

1.5 Ruang Lingkup dan Sistematika Penelitian

Ruang lingkup diperlukan untuk membatasi penelitian agar lebih fokus dan terarah. Ruang lingkup penelitian ini adalah implementasi tugas dan fungsi pokok Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam manajemen konflik antar ormas di Jakarta (2014-2017). Adapun batasan ormas dalam penelitian ini meliputi tiga ormas besar di Jakarta, yaitu Pemuda Pancasila, Forum Betawi Rempug (FBR), dan Front Pembela Islam (FPI). Kemudian, sistematika penulisan penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini berisi lima subbab yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penelitian. Kelima subbab tersebut membahas mengenai hal-hal mendasar dari pelaksanaan penelitian ini.

Bab 2: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Bab ini terdiri atas empat subbab. Subbab pertama mengkaji tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Organisasi, Teori Kinerja, dan Teori Manajemen Konflik. Subbab kedua adalah landasan konsep. Subbab ketiga adalah penelitian terdahulu, selanjutnya subbab keempat adalah kerangka pemikiran.

Bab 3: Metode Penelitian

Bab ini terdiri atas empat subbab, yaitu desain penelitian yang menjelaskan singkat gambaran penelitian, sumber data/subjek/objek penelitian yang menjelaskan jenis data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, prosedur penelitian yang menjelaskan instrumen yang digunakan beserta teknik pengumpulan, analisis dan pengujian keabsahan data. Setiap subbab saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga bab ini menjadi acuan utama untuk tindakan teknis-operasional dalam penelitian ini.

Bab 4: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri atas dua subbab, yaitu gambaran hasil penelitian dan pembahasan masalah. Gambaran hasil penelitian menunjukkan data temuan yang sudah divalidasi oleh peneliti, sehingga hasilnya akurat dan relevan untuk menganalisis fenomena yang bertujuan untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan penelitian. Sementara itu, pembahasan masalah berisi paparan proses dan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian.

Bab 5: Kesimpulan dan Saran

Bab ini terdiri atas tiga subbab. Subbab pertama adalah kesimpulan yang berisi jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian, baik pertanyaan penelitian utama maupun turunan. Subbab kedua berisi saran yang bersifat teknis operasional. Saran ini dibentuk berdasarkan data temuan dan kajian analitis sehingga bersifat ilmiah dan aplikatif. Hal ini sesuai dengan manfaat teoretis dan praktis yang ingin dicapai melalui penelitian

ini. Pada subbab ketiga terdapat penjelasan tentang kontribusi penelitian dan tindak lanjut yang dapat dilakukan terkait dengan hasil penelitian. Kedua hal tersebut ditinjau dari dimensi teoretis dan praktis secara integral.